

KESIAPAN IMPLEMENTASI PP NO.50 TAHUN 2012 DI PERUSAHAAN JASA LAYANAN KONSTRUKSI DENGAN METODE GAP ANALYSIS

Nia Uswatun Annisa¹, Dika Rahayu Widiana², Am Maisarah Disrinama¹, Yusuf Santoso¹

¹Program Studi Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Jurusan Teknik Permesinan Kapal, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya

Surabaya 60111

²Magister Teknik Keselamatan dan Risiko, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
Surabaya 60111

E-mail: niauswatun12@gmail.com

ABSTRAK

Kemajuan industri di Indonesia yang semakin pesat, penerapan SMK3 wajib diterapkan di seluruh perusahaan untuk meningkatkan efektifitas dalam perlindungan K3 yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Berdasarkan PP No. 50 Tahun 2012 pasal 5 ayat 2 bahwa setiap perusahaan dalam penerapan SMK3 wajib berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan Perundang – undangan serta memperhatikan konversi atau standar internasional. Perusahaan ini belum menerapkan PP No. 50 Tahun 2012, yang mana perusahaan wajib menerapkan peraturan ini dengan syarat memiliki paling sedikit terdapat 100 pekerja dan memiliki pekerjaan berisiko tinggi. Untuk mengetahui kesiapan perusahaan dalam pengimplementasian peraturan maka perlu dilakukan analisis kesiapan kebutuhan SMK3 sesuai peraturan PP No. 50 Tahun 2012. Metode yang digunakan untuk analisis kesiapan implementasi PP No.50 Tahun 2012 di perusahaan jasa layanan konstruksi yaitu metode gap analysis. Berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data yang dilakukan perusahaan jasa layanan konstruksi ini kesiapan implementasi 77,78% persyaratan PP No. 50 Tahun 2012, hal tersebut berarti bahwa perusahaan siap untuk menyelesaikan persyaratan PP No. 50 Tahun 2012. Selanjutnya dilakukan penyusunan strategi kesiapan penerapan PP No.50 Tahun 2012 dengan menggunakan metode SWOT yang menghasilkan 9 langkah strategi. Upaya yang dapat dilakukan untuk kesiapan implementasi PP No. 50 Tahun 2012 yaitu dengan memberikan rekomendasi dan melakukan pemenuhan dokumen untuk elemen 1 hingga elemen 12 yang masih terdapat ketidaksempurnaan pada persyaratan PP No. 50 Tahun 2012.

Kata Kunci: gap analysis, perusahaan jasa layanan konstruksi, pp no. 50 tahun 2012, smk3

ABSTRACT

The rapid progress of industry in Indonesia, the application of SMK3 must be implemented in all companies to increase effectiveness in K3 protection that is planned, measured, structured and integrated. Based on Government Regulation No. 50 of 2012 article 5 paragraph 2 that every company in implementing SMK3 must be guided by this Government Regulation and the provisions of laws and regulations and pay attention to conversion or international standards. This company has not yet implemented PP No. 50 of 2012, which requires companies to implement this regulation on the condition that there are at least 100 workers and the company has high-risk work. To find out the readiness of the company in implementing the regulation, it is necessary to analyze the readiness of SMK3 needs according to PP No. 50 of 2012. The method used to analyze the readiness of the implementation of PP No.50 of 2012 in construction service companies is the gap analysis method. Based on the results of data analysis and processing carried out by construction service companies, the readiness to implement 77.78% of the requirements of PP No. 50 of 2012, this means that the company is ready to complete the requirements of PP No. 50 of 2012. Furthermore, the preparation of the readiness strategy for the implementation of PP No.50 of 2012 using the SWOT method resulted in 9 strategic steps. Efforts that can be made for the readiness of the implementation of PP No. 50 of 2012, namely by providing recommendations and fulfilling documents for elements 1 to element 12 which still have imperfections in the requirements of PP No. 50 of 2012.

Keyword : gap analysis, pp no.50 ahun 2012, construction company, oh&s management system

1. PENDAHULUAN

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja menjelaskan bahwa sebuah sistem manajemen perusahaan yang menyeluruh dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan untuk terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif (Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2012). Peraturan Pemerintah No.50 tahun 2012 merupakan peraturan yang digunakan di Indonesia tentang penerapan SMK3, perusahaan yang wajib menerapkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 yaitu perusahaan yang memiliki minimal paling sedikit terdapat 100 pekerja dan perusahaan yang memiliki pekerjaan risiko tinggi terdapat pada PP No. 50 tahun 2012 pasal 5 ayat 2. Sebagai perusahaan yang melayani jasa konstruksi terdapat beberapa pekerjaan yang memiliki risiko bahaya tinggi, dimana risiko bahaya tinggi merupakan pekerjaan yang dapat mengakibatkan kerugian baik manusia dan lingkungan. Dengan perkembangan industri yang cukup pesat, penerapan SMK3 bukan lagi suatu kewajiban melainkan sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi agar perusahaan dapat bersaing di dunia industri yang semakin ketat. Dasar hukum penerapan SMK3 yang harus diikuti di Indonesia yaitu Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2012 sesuai dengan ketentuan.

Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 pasal 5 ayat 4 bahwa setiap perusahaan dalam penerapan SMK3 wajib berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan Perundang – undangan serta memperhatikan konversi atau standar internasional (Peraturan Pemerintah Nomor 50. 2012) dan perusahaan ini belum menerapkan PP No. 50 Tahun 2012, yang mana dalam pernyataan penelitian Suryosagoro (2013) bahwa perusahaan harus mentaati peraturan lokal yang berlaku di tempat perusahaan. Sebagai perusahaan jasa adanya kewajiban untuk menerapkan sistem manajemen K3 memiliki tujuan yang dapat meningkatkan efektifitas dalam perlindungan K3 yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi, dengan adanya dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (Siti Choiriyah et al., 2020). Menentukan pelaksanaan K3 diperusahaan sesuai dengan apa yang direncanakan, melihat pencapaian keefektifan kebijakan K3 dan tujuan perusahaan dapat dilakukan dengan kegiatan audit (Maudica et al., 2020).

Berdasarkan latar belakang, maka akan dilakukan analisis kesiapan SMK3 berdasarkan PP No. 50 tahun 2012, dilakukan analisis kesiapan berdasarkan PP No. 50 tahun 2012 menggunakan metode Gap Analysis guna mengetahui kesenjangan antara persyaratan yang wajib ada dengan persyaratan yang sudah ada diperusahaan, hasil tersebut digunakan untuk mempertimbangan dalam menentukan kesiapan perusahaan menuju SMK3 berdasarkan PP No. 50 tahun 2012. Analisis kesiapan implementasi ini menggunakan metode gap

analysis untuk mengetahui kondisi perusahaan secara actual dengan membandingkan sesuai persyaratan sehingga dapat diketahui kekurangan perusahaan sehingga dapat segera dilakukan perbaikan. Strategi yang digunakan dalam kesiapan penerapan PP No. 50 Tahun 2012 yaitu menggunakan metode SWOT, metode ini digunakan berdasarkan hasil Gap Analysis dan observasi di perusahaan. Hasil dari analisis akan mengetahui kekurangan yang dapat segera dilakukan perbaikan, Rekomendasi perbaikan sesuai dengan temuan – temuan hasil dari analisis kesiapan implementasi PP No. 50 Tahun 2012 dengan melakukan pemenuhan dokumen dan rekomendasi terhadap perusahaan . Hal tersebut dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan dan tenaga kerja dengan mengetahui implementasi penerapan SMK3.

2. PEMBAHASAN

2.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Gap Analysis. Berdasarkan IT Infrastruktur Library (ITIL) dalam (Fernando et al,2017) menjelaskan Gap Analysis merupakan suatu aktivitas yang membandingkan dua macam data dan mengidentifikasi perbedaannya. Gap Analysis digunakan secara terstruktur pada jenis topik atau kategori, membuat analisis kesenjangan menjadi efisien dalam mengidentifikasi sektor atau bidang yang perlu dilakukan perbaikkan. Metode ini dilakukan untuk membandingkan implementasi SMK3 diperusahaan dengan Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 yang dituangkan dalam bentuk checklist.

Dalam melakukan analisis implementasi dibutuhkan dokumen SMK3 perusahaan dan data lain yang didapatkan dari hasil wawancara dengan karyawan yang berkepentingan sesuai dengan bidangnya, serta dilakukan observasi secara langsung ditempat kerja. Dari hasil pengumpulan data kemudian dilakukan penilaian sesuai dengan gap analysis score dan gap analysis range. Data – data yang didapatkan digunakan untuk mengevaluasi kesenjangan dan temuan yang ada dalam persyaratan Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012. Temuan tersebut akan dilakukan perbaikan untuk memaksimalkan penerapan SMK3 berbasis Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012. Adapun tahapan penelitian ini sebagai berikut :

1. Menyiapkan checklist evaluasi berdasarkan persyaratan Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 dengan total 166 poin.

2. Melakukan penilaian setiap item persyaratan sesuai dengan gap analysis score pada Tabel 1,

Tabel 1. Gap Analysis Score

Skor	Variabel
1	Jika organisasi atau perusahaan tidak mengerti apa yang dibutuhkan dan tidak melakukannya
2	Jika organisasi atau perusahaan memahamai pentingnya aktivitas tetapi tidak melakukannya
3	Jika organisasi atau perusahaan memiliki dokumen tetapi belum diterapkan atau dilakukan tapi tidak terdokumentasi
4	Jika organisasi atau perusahaan melakukan aktivitas tetapi tidak konsisten
5	Jika organisasi atau perusahaan melakukan aktivitas dengan baik (dilakukan secara konsisten)

Sumber : Yahya R,dkk, (2018)

3. Melakukan penentuan skor maksimal pada setiap poin persyaratan Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 sesuai dengan Gambar 1



Gambar 1. Diagram Alir Penentuan Skor

Sumber : (Prakasa., 2008)

Berdasarkan Gambar 1, menjelaskan bahwa penilaian diberikan pada range nilai 1 hingga nilai maksimum 5. Terdapat 2 jenis nilai maksimum pada penilaian Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 yaitu penilaian maksimum 3 dengan syarat poin pada setiap persyaratan Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 hanya membutuhkan dokumen persyaratan atau sekedar komitmen dari perusahaan. Sedangkan maksimum nilai 5 dimiliki setiap poin persyaratan yang harus adanya implementasi persyaratan perusahaan.

4. Melakukan penailain kesenjangan dengan cara melakukan wawancara dengan pihak yang berkepentingan dan observasi secara lansung di perusahaan.

5. Analisis kesenjangan digunakan untuk menghitung besar kesenjangan antara keadaan sebenarnya dengan standar kerja yang seharusnya dilakukan, dengan cara sebagai berikut:
Presentase Penilaian = $\frac{\text{Score Checklist}}{\text{Score Maksimal}} \times 100\%$

Sumber : (Apriani & Renosori, 2022)

6. Menentukan penilaian kesenjangan berdasarkan penilaian Gap Assesment pada Tabel 2,

Tabel 2. Gap Assesment

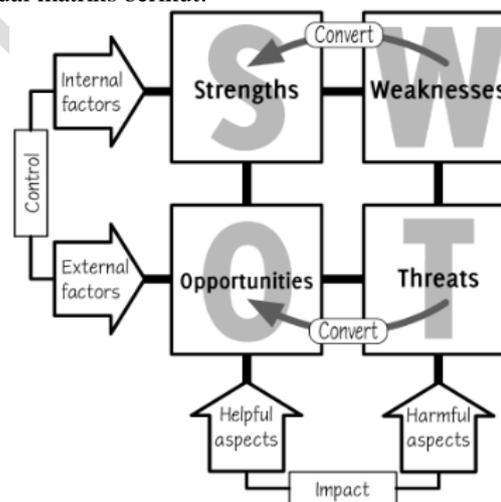
Persentase	Variabel
75% - 100%	Organisasi siap untuk mengimplementasikan ISO 45001:2018
50% - 74%	Organisasi masih harus berbenah untuk mengimplementasikan ISO 45001:2018
1% - 49%	SMK3 organisasi mendesak adanya perbaikan karena jauh dari persyaratan ISO 45001:2018

Sumber : (Fernando et al,2017)

Berdasarkan Tabel 2 menurut Fernando et al,(2017), Gap Assesment dibagi kedalam 3 kategori yaitu, untuk organisasi yang siap menyelesaikan Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012, organisasi yang masih belum mempersiapkan Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012, dan organisasi yang masih jauh dari persyaratan Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012.

7. Hasil dari analisis tersebut maka akan dilakukan upaya perbaikan dengan cara pemenuhan dan rekomendasi terhadap perusahaan untuk setiap temuan – temuan yang tidak sesuai.

8. Selanjutnya, hasil tersebut akan dilakukan penentuan strategi kesiapan implementasi Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 dengan menggunakan metode SWOT, hal tersebut dilakukan sesuai matriks berikut:



Gambar 2. Diagram SWOT

(Sumber : Sarsby, A. 2012)

2.2 Hasil dan Diskusi

Langkah yang dilakukan untuk mengetahui kesiapan implementasi Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 yaitu dengan melakukan pengolahan data yang telah didapatkan dari hasil checklist gap analysis persyaratan Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012. Data yang dihasilkan kemudian dilakukan penilaian tiap poin persyaratan Peraturan

Pemerintah No.50 Tahun 2012. Setelah dilakukan penilaian tiap poin persyaratan Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012, selanjutnya melakukan perhitungan persentase kesiapan implementasi Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012. Hasil persentase diambil dari rata – rata tiap elemen, dan setiap elemen mendapatkan persentase kesiapan implementasi dari setiap sub-elemen. Untuk mengetahui nilai persentase tiap sub-elemen dilakukan dengan cara melakukan perhitungan perbandingan total nilai implementasi dengan total nilai maksimum setiap sub-elemen. Checklist gap analysis memuat selisih penilaian maksimum pemenuhan persyaratan dan penilaian implementasi persyaratan, hal tersebut dapat mengetahui temuan – temuan pada setiap poin persyaratan.

Checklist Gap Analysis disusun sebagai acuan dalam melakukan analisis kesiapan implementasi Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012, maka kesiapan implementasi penerapan SMK3 dapat diketahui secara detail. Penyusunan checklist ini dalam bentuk tabel dengan model perbandingan kesenjangan , yang mana kesenjangan atau gap merupakan perbandingan antara standar persyaratan Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 dengan persyaratan yang sudah ada di perusahaan. Penyusunan checklist gap analysis menghasilkan 166 poin persyaratan yang ditulis dalam pernyataan untuk mempermudah dalam melakukan pengambilan data.

Berdasarkan analisis kesiapan penerapan PP No. 50 Tahun 2012 yang dilakukan menggunakan checklist gap analysis yang telah disusun sebelumnya, didapatkan hasil kesiapan penerapan SMK3 berdasarkan PP No. 50 Tahun 2012 di Perusahaan Jasa Layanan Konstruksi sebesar 77,78% dengan penilaian di tiap elemennya ditunjukkan pada Tabel 3. Berdasarkan hasil persentase kesiapan penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 bahwa perusahaan siap untuk menyelesaikan persyaratan PP No.50 Tahun 2012.

Tabel 3 Persentase Kesiapan Penerapan SMK3 Berdasarkan PP No. 50 Tahun 2012.

Elemen	Persentase
1	78,30%
2	88,68%
3	71,88%
4	72,73%
5	55,26%
6	78,45%
7	83,10%
8	72,97%
9	82,61%
10	82,14%
11	66,67%
12	75,81%

Pada Tabel 3 dapat diketahui hasil persentase kesiapan implementasi persyaratan tiap elemen

dengan nilai presentasi yang tidak sempurna, hal ini menunjukkan bahwa persiapan penerapan persyaratan Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 di perusahaan jasa layanan konstruksi belum sepenuhnya dapat dilakukan karena masih terdapat kekurangan. Tidak hanya hasil persentase kesiapan implementasi Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012, berdasarkan *checklist gap analysis* ini juga memuat selisih penilaian, dimana selisih penilaian ini berasal selisih nilai maksimum persyaratan dengan nilai implementasi persyaratan. Dari hasil analisis didapatkan hasil temuan yang belum memenuhi persyaratan Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012, temuan terdapat 3 jenis yaitu Mayor, Minor, dan Kritis. Hal tersebut dapat diketahui perusahaan masih belum maksimal dalam kesiapan penerapan SMK3 Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 diperusahaan. Berikut hasil temuan tiap elemen Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 ditunjukkan pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Temuan kesiapan Implementasi ISO 45001:2018 tiap elemen

Elemen	Total Item Persyaratan	Temuan Mayor	Temuan Minor
1	26	6	10
2	14	1	5
3	8	6	0
4	7	1	5
5	8	7	1
6	41	11	20
7	17	4	5
8	9	5	1
9	12	3	4
10	6	0	5
11	3	1	2
12	14	6	5

Berdasarkan data pada Tabel 4 diketahui bahwa terdapat 12 elemen dalam Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012, yang mana pada setiap elemen terdapat temuan - temuan. Kesiapan penerapan SMK3 perusahaan jasa layanan konstruksi belum siap secara maksimal dikarenakan masih terdapat banyak temuan yang perlu adanya perbaikan untuk peningkatan kesiapan penerapan Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012. Dengan demikian, dapat diketahui hasil persentase kesiapan implementasi persyaratan Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 diperusahaan ini sebesar 77,78% dengan jumlah temuan 114 poin persyaratan dari total 166 poin persyaratan, hal tersebut dikarenakan perusahaan belum memenuhi persyaratan yang diwajibkan oleh Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012. Sehingga perlu dilakukan upaya untuk peningkatan kesiapan penerapan SMK3 Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 dengan melakukan pemenuhan dokumen dan rekomendasi untuk perusahaan. Berdasarkan tabel 4 tindakan perbaikan

pada temuan mayor terdapat tujuh kriteria yang tindakan perbaikan yang dilakukan adalah dengan penyusunan dokumen yang dibutuhkan, terdapat 42 kriteria dengan tindakan perbaikan berupa rekomendasi kepada perusahaan dan terdapat satu 11 kriteria dengan tindakan perbaikan berupa penyusunan dokumen dan juga pemberian rekomendasi kepada perusahaan. Penyusunan dokumen tersebut yakni meliputi :

- a. Dokumen Manual SMK3 berdasarkan PP No.50 Tahun 2012, perusahaan telah memiliki manual SMK3 berdasarkan ISO 45001:2018 dalam persiapan penerapan SMK3 PP No.50 Tahun 2012 dilakukan pemenuhan dokumen penyusunan Manual SMK3.
- b. Dokumen Prosedur Rapat P2K3, dimana dokumen ini diperlukan untuk pemenuhan kriteria 1.4.9., Pada dokumen ini dilengkapi pula dengan Formulir Undangan Rapat.
- c. Dokumen Prosedur Pembelian Barang dan Jasa, dimana dokumen ini diperlukan untuk pemenuhan kriteria 3.2.1; kriteria 5.1.1; kriteria 5.1.2.
- d. Dokumen Prosedur LOTO, dimana dokumen ini diperlukan untuk pemenuhan kriteria 6.5.6; 6.5.7; kriteria 6.5.8. Pada dokumen ini dilengkapi pula dengan Formulir pemasangan Lock Out dan Tag Out.
- e. Dokumen Prosedur Penanganan Masalah K3, dimana dokumen ini diperlukan untuk pemenuhan kriteria 8.4.1.
- f. Dokumen Prosedur P3K, dimana dokumen ini diperlukan untuk pemenuhan kriteria 6.8.1. Pada dokumen ini dilengkapi pula dengan Formulir Checklist kotak P3K.
- g. Penyusunan Dokumen Instruksi Kerja sesuai pekerjaan yang ada diperusahaan yang terdapat pada kriteria 3.1.2 yaitu Instruksi Kerja *Bending*, Instruksi Kerja Pengelasan, Instruksi Kerja *Pressing*, Instruksi Kerja *Cutting*, Instruksi Kerja *Marking*, Instruksi Kerja *Lifting*, dan Instruksi Kerja penggerindaan.

Hasil dari analisis kesiapan penerapan SMK3 Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 akan dilakukan sebagai pedoman dalam menentukan strategi penerapan Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 menggunakan metode SWOT, berikut merupakan matriks SWOT:

Tabel 5. Matriks SWOT

S Strength (Kekuatan)	W Weakness (Kelemahan)
1. Top manajemen berkomitmen penuh 2. Perusahaan telah	1. Terdapat 61 temuan minor dan 53 Temuan Mayor yang belum

	menerapkan SMK3 standar ISO 45001:2018	memenuhi persyaratan PP No.50 Tahun 2012 2. Kurangnya SDM dalam bidang SMK3 yang memadai untuk persiapan penerapan PP No.50 Tahun 2012
O Opportunity (Peluang) 1. Kepatuhan hukum terhadap penerapan SMK3 yang dapat membantu perusahaan yang mematuhi peraturan perundang – undangan SMK3 lokal yaitu PP No.50 Tahun 2012	Strategi S – O 1. Proses kesiapan migrasi perusahaan dalam mentaati peraturan SMK3 lokal mendapat dukungan penuh dari top manajemen (S1,O1) 2. Menyiapkan dan memastikan persyaratan PP No.50 Tahun 2012 (S2,O1)	Strategi W – O 1. Memberikan rekomendasi untuk disarankan ke perusahaan agar persyaratan dapat terpenuhi (W1,O1) 2. Melakukan pembagian tugas untuk menyiapkan pemenuhan persyaratan PP No.50 Tahun 2012 (W2,O1)
T Threat (Ancaman) 1. Jika ada perubahan mendadak dalam peraturan SMK3, perusahaan mungkin menyesuaikan secara cepat 2. Karyawan tidak mematuhi peraturan SMK3 yang terbaru	Strategi S – T 1. Melakukan sosialisasi kepada semua karyawan tentang migrasi penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 (S1,T1,T2) 2. Perusahaan melakukan pembagian penanggung jawab untuk penerapan SMK3 (S1,T2)	Strategi W – T 1. Memaksimalkan partisipasi karyawan agar target dapat tercapai (W2,T1,T2) 2. Perusahaan mempromosikan kesadaran keselamatan sesuai peraturan yang terbaru (W1,T2) 3. Mendokumentasikan semua persyaratan

		PP No.50 Tahun 2012 (W1,T1)
--	--	-----------------------------------

Strategi migrasi yang dihasilkan dari analisa SWOT diatas selaras dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Masjuli (2017) mengenai langkah – langkah yang dapat dilakukan dalam rangka persiapan penerapan PP No.50 Tahun 2012. Penelitian juga telah dilakukan oleh Nisak (2013) yaitu Analisis SWOT untuk menentukan strategi kompetitif perusahaan, hal tersebut membuktikan bahwa strategi hasil analisa SWOT ini dapat digunakan untuk proses persiapan penerapan di Perusahaan Jasa Layanan Konstruksi. Terdapat 9 strategi untuk kesiapan penerapan SMK3 Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012..

3. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Perusahaan Jasa layanan Konstruksi memiliki kesiapan untuk melakukan migrasi ke standar PP No.50 Tahun 2012 sebesar 77,78% dengan 22,22% ketidak sempurnaan hal tersebut dikarenakan terdapat 114 temuan dari 166 total persyaratan. Hal ini berarti perusahaan siap untuk menyelesaikan SMK3 berdasarkan standart PP No.50 Tahun 2012. Dengan demikian, perusahaan harus meningkatkan upaya kesiapan mengimplementasikan persyaratan PP No.50 Tahun 2012 dan melengkapi dokumen yang kurang untuk memaksimalkan penerapan SMK3 di perusahaan. Terdapat 9 strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesiapan penerapan SMK3 PP No.50 Tahun 2012.

PUSTAKA

- [1] Apriani, A. S., & Renosori, P. (2022). Analisis Gap untuk Kesiapan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 di CV Ardian. *Bandung Conference Series: Industrial Engineering Science*, 2(1), 72–78. <https://doi.org/10.29313/bcsies.v2i1.1584>
- [2] Fernando, J. M., Purwanggono, B., & ... (2017). Analisis Kesiapan Sertifikasi ISO 9001: 2015 Pada PT. Wijara Nagatsupazki Dengan Menggunakan Metode Gap Analysis. *Industrial Engineering Online Journal*.
- [3] Maudica, S. B., Denny, H. M., Kurniawan, B., Peminatan, M., Kerja, K., & Masyarakat, F. K. (2020). *TANTANGAN DAN HAMBATAN PROSES AUDIT SMK3 DI SEBUAH PERUSAHAAN GALANGAN KAPAL DI ERA PANDEMI COVID-19*. 8(September).
- [4] Peraturan Pemerintah Nomor 50. 2012. (2012). *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.Kementrian Hukum dan Hak Azazi Manusia*.
- [5] Prakasa, A. T., Setyanto, N. W., Wijaya, L. T., & Kusuma, N. (2008). Analysis of the Implementation of Quality Management System Iso 9001: 20. *Analisis Penerapan Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Menggunakan GAP Analysis Tools Di PT. Sahabat Rubber Industries, Malang*, 3(1), 11–21.
- [6] Sarsby, A. (2012). *A Useful Guide to SWOT Analysis.Pansophix Online* : Nottingham. ISBN 978-1-906460-89-1
- [7] Siti Choiriyah, Feri Harianto, & Dian Henggar. (2020). Analisis Tingkat Implmentasi Smk3 Pada Konstruksi Bangunan Di Surabaya Berdasarkan Pp No 50 Tahun 2012.

- PADURAKSA: Jurnal Teknik Sipil Universitas Warmadewa*, 9(1), 73–79. <https://doi.org/10.22225/pd.9.1.1675.73-79>
- [8] Suryosagoro, S. B., Laksito, B., & Sugiyarto, S. (2013). ANALISIS KONDISI SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) PADA PROYEK KONSTRUKSI MENUJU. *E-Jurnal MATRIKS TEKNIK SIPIL*, 1(4), 496–502. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/mateksi.v1i4.37506>
 - [9] Syahrullah, Y., & Febriani, A. (2017). Fakultas Teknik – Universitas Muria Kudus 153. *Prosiding SNATIF Ke-4 Tahun 2017*, 153–160.
 - [10] Yania, W. L., & Sutanto, S. (2022). International Labour Organization The International Organization for menggunakan instrumen Gap Analysis Checklist dengan menelusuri dokumen. *GEMA Lingkungan Kesehatan*, 20(02), 82–89.
 - [11] Yahya,R, dkk. (2018). *Analysis of OHSAS18001:2007 standart renewal towards ISO 45001:2018 at PT. PowerPlant Indonesia by Using Gap Analysis Method*. EDP Science. SHS Web of Conferences49, 01009.